

**ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN *FIQH SIYASAH*
TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh :

**WAHYU SAMAN HUDI
NPM : 1421020231**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN *FIQH SIYASAH*
TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh :

**WAHYU SAMAN HUDI
NPM : 1421020231**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah tuhan yang memiliki kesetaraan dan kekhalfahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kepemimpinan transgender di Indonesia menurut HAM dan *fiqh siyasah* dan apa persamaan dan perbedaan antara HAM dan *fiqh siyasah* mengenai kepemimpinan transgender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia dan *fiqh siyasah* mengenai kepemimpinan transgender dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia mengenai kepemimpinan transgender. Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif komparatif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu al-Qur'an dan Hadits, UUD NRI Tahun 1945, buku-buku *fiqh siyasah* dan HAM, serta dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih maupun di pilih dalam menjalankan amanat pemerintahan. Dengan demikian di Indonesia seorang transgender dapat menjadi presiden karena tidak ada satupun aturan yang melarangnya Dalam *fiqh siyasah* seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Allah dan Rasul juga melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, Dalam konteks kepemimpinan bagaimana mungkin seorang transgender dapat menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan bertingkah laku seperti perempuan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kepemimpinan transgender menurut HAM dan *fiqh siyasah* yaitu HAM dan *fiqh siyasah* sama-sama mengakui bahwa jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan, serta mengakui atas kesetaraan di depan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa memandang warna kulit, suku, bahasa atau tanah air. Perbedaan, Sementara mengenai perbedaannya, dalam *fiqh siyasah* seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan berdasarkan hak asasi manusia seorang transgender dapat menjadi pemimpin.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH
TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**

Nama : WAHYU SAMAN HUDI

NPM : 1421020231

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

NIP. 197408162003122004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi: **ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN FIOH SIYASAH**
TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER, disusun oleh **WAHYU**

SAMAN HUDI, NPM: 1421020231, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah**

Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan

Hukum pada hari/tanggal: Kamis, 05 Desember 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

Sekretaris : **Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Penguji II : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Khairuddin, M.H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ،
وَالْمُنْتَرَجِلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ . (البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Keluarkan mereka (usir) dari rumah-rumah kalian”. (HR. Bukhari).



PERSEMBAHAN

Sembah sujud ku kepada Allah SWT yang Maha Segalanya dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaatnya. Ucapan terimakasih ku persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sapari S.Pd dan Ibunda Daliana, atas semua ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Meri Farida Amd.keb, Eva yuliana S.Pd, Bripda Desi Afriani terimakasih atas suport yang telah kalian berikan.
3. Teman seperjuanganku di UIN Raden Intan Lampung terutama yang berada di kelas Siyasah C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan yang begitu berharga.
4. Sahabat-sahabat dan Alumni PMII Rayon Syari'ah yang telah memberikan banyak pengalaman dan rasa kekeluargaan.
5. Sahabat-sahabat dari komunitas VIKING LAMPUNG dan Rekan-rekan DRIVER ONLINE yang telah memberikan banyak pengalaman.
6. Sahabat-sahabat terdekat IPDA Rizka Ari Wandari, Komala Dewi, Roy Indra Yusuf, Juwita Tri Utami, Parizon, Ikhsan Chandra Purnama, Tegar Rivaldy, Hendri Widodo, Ryan Aryandi, Uje, Peni Selfi Merliani
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wahyu Saman Hudi dilahirkan pada tanggal 04 November 1995, di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Penulis adalah putra Ke empat dari empat bersaudara, yang dilahirkan oleh ayahanda yang bernama Sapari S.Pd dan ibunda Daliana dengan riwayat sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu Kec.Sukarame Bandar Lampung,lulus pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar (SD Negeri) SD Negeri 2 Way Dadi Kec.Sukarame Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Bantar Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) Jurusan Siyasah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag. M.H, selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A, selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada segenap civitas akademika, dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan di setiap sujudnya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi kemajuan pemikiran mahasiswa Fakultas Syari'ah serta masyarakat pada umumnya. Amin Yarobbal'Alamin.

Bandar Lampung, 31 Desember 2019

Penulis

Wahyu Saman Hudi
1421020231

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	13
B. Pengertian Pemimpin	15
C. Hukum Mengangkat Pemimpin	22
D. Syarat-Syarat Pemimpin	27
E. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin	29
F. Transgender Dalam Islam	32
G. Tinjauan Pustaka	36
BAB III KEPEMIMPINAN TRANSGENDER MENURUT HAM DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Transgender	41
B. Kepemimpinan Transgender Menurut HAM	55
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Kepemimpinan Transgender di Indonesia menurut HAM dan <i>Fiqh Siyasah</i>	68
B. Persamaan dan perbedaan antara HAM Dan <i>Fiqh siyasah</i> Mengenai Kepemimpinan Transgender Di Indonesia	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Analisis Hak Asasi Manusia Dan *Fiqh siyasah* Terhadap Kepemimpinan Transgender**”. Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹

2. Transgender

Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex*

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h, 58

Reassignment Surgery). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome.²

3. *Fiqh siyasah*

Ajaran, fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.³

4. Hak asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

5. Kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.⁵

² M Dahlan Al-Barry dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2005), h. 757.

³ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) h. 44.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. ke-2), h. 3.

⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Transgender merupakan suatu orientasi seksual atau kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual, romantis, emosional (kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama yang akan dikaji dalam pandangan Hukum Islam *fiqh siyasah* dan Hak Asasi Manusia.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “**Analisis Hak Asasi Manusia Dan *Fiqh siyasah* Terhadap Kepempimpinan Transgender**” adalah:

1. Alasan Obyektif

Mengingat fenomena transgender akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat, sehingga menarik untuk dikaji dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai transgender .

2. Alasan Subyektif

Karena pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah jurusan Hukum fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kedudukan tersebut

merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Kedudukan suci Rasulullah SAW yang pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci kedua adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan Rasul sebagai seorang hakim yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci ketiga adalah sebagai penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Rasul adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat.⁶

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandaskan syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.⁷

⁶ Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi (Jakarta: Sadra International Institute, 2011), h. 137.

⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) h. 3.

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan?. Tentu tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin.

Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya, tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya.⁸

Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.⁹

Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap Muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpinan salah satunya adalah al-Mawardi, yaitu seorang ulama dari Madzhab Syafi'i.

⁸ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer (Bandung: Mizan, 1993), h. 169

⁹ *Ibid*, h. 170.

Dalam kitabnya *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, beliau menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

Pertama, keseimbangan (*al-adâlah*) yang memenuhi semua kriteria. Kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga, pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu. Keempat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Ketujuh, mempunyai nasab dari keturunan Quraisy.¹⁰

Kemudian hal ini juga dituliskan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam kitab *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.¹¹ Tentu saja masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat kepemimpinan yang disebutkan di atas.

¹⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Ibid. h. 6.

¹¹ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), h. 548.

Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹² Undang- Undang No 42 Tahun 2008.

Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Ditinjau dari jenis kelamin, Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqh disebut sebagai mukhannats.

Jika dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan, apakah diperbolehkan bagi seorang transgender untuk menjadi pemimpin? Hal ini berhubungan dengan apa yang telah terjadi di India yaitu Madhu Bai Kinnar seorang transgender terpilih menjadi Walikota tepatnya di Raigarh Chhattisgarh pada

¹² Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), h. 548.

tanggal 04 Januari 2015. Ia memenangkan pemilihan umum walikota di daerah tersebut dengan perolehan suara mayoritas sekitar lebih dari 4500 suara.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul “**Analisis Hak Asasi Manusia Dan *Fiqh siyasah* Terhadap Kepemimpinan Transgender**”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang di angkat dari penulisan ini adalah menganalisa dari hukum *fiqh siyasah* dan hukum hak asasi manusia yang berlandaskan undang undang dalam hal menentukan pemimpin transgender apakah pemimpin tersebut layak menurut *fiqh siyasah* dan hukum hak asasi manusia yang telah di atur oleh undang - undang dasar.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan skripsi ini adalah perbedaan konsep kepemimpinan transender dalam *fiqh siyasah* dan hukum hak asasi manusia. Pokok permasalahan di atas diurai dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan transgender di Indonesia menurut HAM dan *fiqh siyasah*?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara HAM dan *fiqh siyasah* mengenai kepemimpinan transgender di Indonesia?

¹³ Farida Elfia, DKK, “Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia”. *Diponegoro Law Riview*, Vol. I, No. 4 (18 Agustus 2019). h. 3.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia dan *fiqh siyasah* mengenai kepemimpinan transgender di Indonesia.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia mengenai kepemimpinan transgender di Indonesia.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi yang akan di dapat dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan dampak positif, antara lain:

1. Dalam bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia dalam kepemimpinan transgender yang secara langsung dapat merespon kenyataan yang terjadi pada masa kini.
2. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan meyakinkan tentang pandangan *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia terkait dengan kepemimpinan transgender.
3. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat sebagai acuan untuk melihat kembali lebih dalam hubungan antara transgender dengan hak asasi manusia terutama dalam hal menentukan calon pemimpin agar sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum, dalam hal ini penulis membandingkan antara *fiqh siyasah* dengan hak asasi manusia mengenai kepemimpinan bagi seorang transgender.¹⁵

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yang dimaksud dengan metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Sedangkan *komperatif* yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *fiqh siyasah* Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3), *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11.

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan lainnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu upaya pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

¹⁷ J.Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h. 112-116.

¹⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, dengan pendekatan content analisis yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan dekskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.²⁰

¹⁹Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengatar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

BAB II

KONSEP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹ Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²

Menurut Suyuthi Pulungan,³ mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

² T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26.

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) h. 22-23.

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah*

(peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁴

Sementara menurut Muhammad Iqbal,⁵ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :

- 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
- 2) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
- 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.

b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :

- 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
- 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)

Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

B. Pengertian Pemimpin

Allah menurunkan manusia kebumi, untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ard. Karena manusia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya.

Manusia bukan hanya diberikan fisik yang hebat, dan akal yang luar biasa.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

⁵ *Ibid.* h. 15-16.

Tetapi juga struktur kejiwaan yang indah. Sehingga semua potensi tersebut, tidak Allah berikan secara percuma. Tapi Allah perintahkan manusia dengan segala keberdayannya untuk menciptakan kemakmuran dimuka bumi. (al-imarah).⁶

Menurut Al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidin* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambing kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimma al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr syay amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengajarkan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-hubungannya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemashlahan bagi manusia.⁷

Pandangan Muhammad Iqbal tentang kehidupan yang seimbang antara moral dan agama, etika dan politik, ritual dan duniawi, sebenarnya bukanlah

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 23

⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). h. 269.

hal yang baru dalam pemikiran Islam. Namun, dalam perjalanan sejarah, pemikiran demikian terkubur bersama arus kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk, terutama sejak keruntuhan dan kehancuran Baghdad. Sehingga umat Islam tidak lagi mampu menangkap visi dinamis dalam doktrin Islam (al-Qura'an). Akhirnya walaupun tidak ditegaskan kedalam konsep oleh para mullah lahirlah pandangan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama yang menyeret umat untuk meninggalkan kehidupan duniawi, akibatnya, hukum pun menjadi statis dan al-Qur'an tidak mampu dijadikan sebagai referensi utama dalam hal menjawab setiap problematika.⁸

Inilah yang terjadi dalam lingkungan sosial politik umat Islam. Oleh sebab itu, Muhammad Iqbal ingin menggerakkan umat Islam untuk kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah tuntunan ajaran al-Qur'an. Nilai-nilai dasar ajaran al-Qur'an harus dapat dikembangkan dan digali secara serius untuk dijadikan pedoman dalam menciptakan perubahan itu. Kuncinya adalah dengan mengadakan pendekatan rasional al-Qur'an dan mendalami semangat yang terkandung di dalamnya, bukan menjadikannya sebagai buku undang-undang yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mati dan kaku.⁹

Kepemimpinan dalam perspektif *fiqh siyasah* syar'iyah (Fiqh perpolitikan) adalah suatu hal yang harus selalu dibangun, dan dijaga dengan baik; bukan untuk dikejar. Karena dengan motif membangun dan menjaga inilah, kita akan bisa melahirkan pemimpin yang autentik. Autentik dalam berintegritas,

⁸ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, Terjemahan Hawasi dan Musa Kazhim (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 208.

⁹ *Ibid*, h. 209.

otentik dalam berkapasitas, autentik dalam pengalaman, dan autentik dalam ketaatan menjalankan perintah agama. Akan berbeda jadinya, jika persepsi kita dalam kepemimpinan, adalah sesuatu yang harus dikejar. Segala cara bisa dihalalkan. Bahkan dalam psikologi politik dikatakan, bahwa orang yang berambisi terhadap kepemimpinan, cenderung sulit untuk melepaskan jabatan kepemimpinannya. Dari sinilah lahir motif pemimpin yang otoriter itu biasanya lahir. Dan itulah pentingnya peran agama dalam berpolitik. Bahwa landasan seorang muslim dalam kepemimpinan ialah na'buda ilallah (beribadah kepada Allah), wa la nusyrika bihi syaian (tidak menyekutukan sesuatu yang lain selain Allah).¹⁰

Dan jawaban mengapa kepemimpinan/jabatan, bukanlah sesuatu yang harus dikejar; sesuai dengan hadits rasul :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”. (H.R. Muslim).¹¹

¹⁰ Ibid. h. 24.

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah,

Kemudian telah di sampaikan dalam firman al quran sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’: 58).¹²

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya *high-risk*, tetapi juga *high-value*. Karena Allah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemimpin yang adil, tetapi juga mengancam para pemimpin yang dzalim. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, ”pemimpin yang adil dalam satu hari, lebih baik daripada beribadah kepada Allah selama 70 tahun”. Itulah cara Allah menghargai pemimpin. Tapi rasul juga bersabda, ”kullu kum roin wa kullukum mas’ulun anraiyathi”. Tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.¹³

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik* dan *Sulthan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum¹⁴, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata *imam* juga digunakan untuk orang

1379 H), h. 341.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). h. 43.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin.....*, h. 26.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), h. 428.

yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.¹⁵

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata *imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan *imam* dalam arti yang mengimami shalat.¹⁶

Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata *imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.¹⁷

Kata *khalifah* berasal dari kata *al-khalaf* yang berarti *al-badal* yang artinya menggantikan, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat*". (QS. Yunus :14)¹⁸

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti

¹⁵ Ali al-salus, *Imamah dan Khifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 15.

¹⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*...., h. 53.

¹⁷ A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 12

seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.¹⁹

Secara bahasa *amir* berasal dari kata (*Amara-ya 'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah. Kata-kata *amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "amara" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat.

Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "*dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir*". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai *khalifah* menggantikan abu bakar.²⁰

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.²¹ *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Kata-kata *Sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.²²

¹⁹ Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.

²⁰ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), h. 344.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus*, Ibid. h. 428.

²² A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*..., h. 60.

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.²³

C. Hukum Mengangkat Pemimpin

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya²⁴

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.²⁵

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan

²³ *Ibid.* h. 60.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 108.

²⁵ *Ibid.* h. 108.

lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.²⁶

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.²⁷ Dalil bantahan atas pernyataan al-Asham di atas adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. al- Baqarah: 30).*²⁸

²⁶ *Ibid.* h. 108-109.

²⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 12

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'adah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari kalian amir.” Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”.²⁹

Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.”³⁰

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'adah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari

²⁹ *Ibid.* h. 589.

³⁰ *Ibid.* h. 590.

kalian amir.”Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin.³¹

Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.”

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (*Wajib aini*), tetapi kewajiban kolektif (*wajib kifa'i/fardu kifayah*). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.³²

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya,

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran....*, h. 40

³² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam....*, h.111.

termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.³³

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).³⁴

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah

³³ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 227.

³⁴ Mohammad Rusfi, AL-‘ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh yang ada menunjuknya kecuali Allah dan RasulNya.³⁵

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.³⁶

D. Syarat-Syarat Pemimpin

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh,

³⁵ Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*...., h. 112.

³⁶ *Ibid.* h. 113.

mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.³⁷ Syarat pemimpin menurut al-Mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu:

1. *Al-adâlah*.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid.
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
7. Nasab dari keturunan quraisy.³⁸

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, *Pertama*: Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan QS. Ali Imran ayat 28 karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan QS. al-Nisa": 141). *Kedua*: Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan

³⁷ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al- Mukhtâr*...., h. 522

³⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*...., h. 5.

menyelesaikan berbagai persoalan. *Ketiga*: Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. *Keempat*: Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain. *Kelima*: Adil. Yaitu menghiiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar. *Keenam*: Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. *Ketujuh*: Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. *Kedelapan*: Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujuan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas dengan secara umum.³⁹

E. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

1. Dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.

³⁹ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 164.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.⁴⁰ Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.⁴¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal.

Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. *Kedua:* Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimîn* dari penduduk bashrah.⁴²

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang

⁴⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam....*, h .6

⁴¹ *Ibid.* h. 7.

⁴² *Ibid.* h. 7.

memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti halnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”⁴³

2. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya.⁴⁴

Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga asyura. Anggota lembaga syura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya

⁴³ *Ibid.* h. 7.

⁴⁴ *Ibid.* h. 8.

atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁴⁵

3. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “*Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah*” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, „ini adalah pemimpin” ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”⁴⁶

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bias menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁴⁷

F. Transgender Dalam Islam

Muhammad bin Ali bin Muhammad al -Syaukani dalam kitabnya Nailual-Authâr menjelaskan bahwa pada zaman nabi sudah ada transgender dan yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik dan Hinaba. Transgender di zaman nabi ada yang memang asli transgender dan ada yang buatan. Transgender asli pada umumnya tingkah lakunya tidak kelihatan membahayakan kepada kaum wanita. Dan oleh sebab itu istri-istri nabi menganggap mereka

⁴⁵ *Ibid.* h. 10.

⁴⁶ Ibn Taimiyah, *Minhaju al-Sunnah al-Nabâwiyyah*, (Baulaq, tp, tt), jilid. I, h. 142.

⁴⁷ *Ibid.* h. 141.

(transgender asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat). Meskipun begitu nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida" (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).⁴⁸ Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحَنَّتٌ فَقَالَ لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّاغُوتَ فَإِنِّي أَدْلُكَ عَلَى ابْنَتِهِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتَدْبِرُ بِنِّمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُنَ هَؤُلَاءِ عَ لَيْكُمُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) "

Artinya: *Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi saw sedang berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Umayyah, 'Jika Allah membukakan buat kalian Thaif besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, ia seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi saw pun bersabda, "Janganlah orang ini memasuki (tempat-tempat) kalian."*(HR Bukhari).⁴⁹

Dalam hadits lain, Rosulullah SAW melaknat laki-laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ . (البخارى)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu*

⁴⁸ Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, (Mesir: Dâr al-Hadits, tt), Juz VI, h. 176.

⁴⁹ *Ibid.* h. 174

*'alaihi wa sallam bersabda: "Keluarkan mereka (usir) dari rumah-rumahkalian"'.(HR. Bukhari).*⁵⁰

Menurut Imam al-Nawawi, transgender ada dua macam, *pertama*: orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau berlagak dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, atau gerak-geriknya. Semuanya alami. Allah memang menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender jenis ini dimaafkan, karena dia tidak membuat-buat menjadi seperti itu. Transgender jenis ini disebut sebagai transgender asli. *Kedua*: transgender yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai seorang transgender. Tetapi, dia membuat-buat dan bertingkah laku layaknya perempuan dalam gerakannya, dandanannya, cara bicara, dan gaya berpakaian. Inilah transgender yang tercela. Transgender jenis inilah yang disebut sebagai transgender buatan.⁵¹

Ibn Hajar berkata dalam *Fath al-Bari*: "Hal ini (laknat) khusus bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam kondisi tersebut, maka mereka diperintahkan untuk berusaha keras untuk meninggalkannya (menyerupai wanita atau sebaliknya) dan membiasakan diri (untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya) secara bertahap. Jika dia tidak mau berusaha untuk meninggalkannya dan malah terus menerus dalam kondisinya tersebut, maka celaan hadits ini juga berlaku baginya. Karena terus menerus dalam

⁵⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syura: Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Lc, No. 5886, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). H. 345.

⁵¹ Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987), h. 317.

kondisinya (menyerupai wanita atau sebaliknya) merupakan tanda bahwa dia ridha terhadap hal tersebut.⁵² Karena di dalam alquran tidak mengenal kelamin transgender, hal ini tertulis dalam ayat berikut:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Artinya, “Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (Qs An Najm : 45).⁵³

Adapun pendapat yang memutlakkan bahwa orang-orang yang memang diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, seperti pendapat al-Nawawi, maka hal ini dibawa kepada makna jika orang tersebut tidak sanggup untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya dan cara jalan dan berbicara yang seperti wanita setelah dia mengusahakan pengobatan untuk menghilangkannya. Maka kapan saja memungkinkan baginya untuk menghilangkannya namun dia tidak berusaha melakukannya, maka dia berhak atas laknat sebagaimana dimaksud dalam hadits.”⁵⁴

Padahal di dalam alquran kita sesama manusia harus berlaku adil kepada manusia lainnya. Hal ini tercantum pada surat Asy-Syuura Ayat 15 sebagai berikut:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi

⁵² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*...., h. 332.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 234.

⁵⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*...., h. 332.

kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)". (Q.S Asy-Syuura: 15)⁵⁵

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Choirul Nur Akrom dengan judul skripsi "*Transgender dalam Presektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukannya ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupu perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia ada dua macam yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam perspektif hukum positif

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 123.

keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia.⁵⁶

Dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu. Setelah dianalisis secara mendalam maka transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam jika menyangkut konsep dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. Namun dalam realitas di antara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dalam kenyataannya.⁵⁷

2. Nur Delia “*Transgender dalam Persepsi Masyarakat*”. Di dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa dalam kacamata normatifitas agama dan etika masyarakat konvensional, keberadaan kaum transgender menjadi sesuatu hal yang tertolak dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan aturan umum yang berlaku senantiasa tidak menyediakan tempat bagi hidupnya aktifitas-aktifitas yang dianggap negatif dan tidak sesuai dengan koridor kesusilaan, apalagi bagi kelompok sosial yang telah menerima citra dan stigma (label) yang dekat dengan nuansa seperti pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya. Oleh karena itu, Jika hal tersebut diposisikan berhadapan dengan keberadaan kaum waria di Kota

⁵⁶ Choirul Nur Akom, *Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi UIN Raden Fatah: 2017), h. 78

⁵⁷ *Ibid.* 79.

Makassar maka akan terjadi sebuah perbenturan kebudayaan. Akan tetapi, hal ini tidak kemudian lantas menutup peluang untuk melakukan negosiasi sosial diantara keduanya, sebab pada beberapa sisi tertentu, dua kebudayaan yang saling berbeda dapat dipertemukan dan menjalin harmonisasi kebudayaan. Asumsi dasarnya lahir karena padatiap kebudayaan tertentu memiliki unsur yang niscaya saling terkait satu sama lain, sehingga peluang untuk diterimanya (kompromi) kebudayaan yang tadinya saling bertolak menjadi dimungkinkan dan menciptakan harmonisasi budaya dalam sebuah masyarakat.⁵⁸

3. Anita Florencya “*Agama, Praktek-praktek Keagamaan, dan Sikap terhadap Isu LGBT (Lesbian, Gay, Bioseksual, dan Transgender)*”. Di dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa sikap responden difokuskan dalam 2 indikator yaitu yang pertama merupakan indikator pendapat mengenai peran gender tradisional di mana mayoritas 48 responden yang setuju bahwa pria dan wanita memiliki peran gender yang terpisah dan saling melengkapi untuk berperan di masyarakat dan yang kedua merupakan indikator pendapat mengenai tingkat kenyamanan responden ketika berinteraksi dengan LGBT reponden cenderung memilih bersikap netral pada LGBT karena mereka beranggapan bahwa keberadaan LGBT tidak begitu membahayakan dan tidak begitu mengganggu kenyamanan selagi kaum LGBT tersebut tidak bersikap buruk di depan umum.⁵⁹
4. Yeni Sri Lestari “*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*”. Di dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa keberadaan kaum LGBT di

⁵⁸ Nurdelia, *Transgender dalam Persepsi Masyarakat* (Skripsi IAIN Surakarta: 2017), h. 78

⁵⁹ Anita Florencya, *Agama, Praktek-praktek Keagamaan, dan Sikap terhadap Isu LGBT (Lesbian, Gay, Bioseksual, dan Transgender)* (Skripsi IAIN Surakarta: 2017), h.

dunia pada saat ini terus berupaya untuk menyamakan hak-hak mereka dengan gender lainnya. Hal ini muncul bukan tanpa sebab, keinginan yang kuat untuk dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan bernegara menjadikan kaum LGBT gencar menunjukkan eksistensinya serta berupaya untuk melegalkan eksistensi mereka tersebut. Persoalan muncul dikarenakan tidak semua negara menganut konsep HAM yang universal, yaitu menyamaratakan setiap hak individu di mata negara, seperti yang terjadi di Amerika. Sejarah panjang perjuangan LGBT di Amerika menunjukkan dari ketidaksetujuan masyarakat Amerika terhadap LGBT menjadi tolak ukur negara lain untuk tetap berjuang dalam menuntut hak mereka, terlebih lagi setelah dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Amerika pada tahun 2015 menjadi momentum besar kebangkitan LGBT di negara lain seperti Indonesia.⁶⁰

5. Resti Hedi Juwanti “*Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Islam*”. Di dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa dalam fiqh siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Karena Islam tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin, melainkan hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. Allah dan Rasul juga melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, bagaimana mungkin seseorang yang telah melanggar aturan agama dengan menjadi transgender diperbolehkan

⁶⁰ Yeni Sri Lestari, *Lesbian, Gay Biseksual, dan Transgender* (Skripsi: Universitas Teuku Umar, 2018), h. 85.

menjadi pemimpin, sedangkan seorang pemimpin haruslah orang yang dapat menjadi panutan bagi rakyatnya.⁶¹

Selain itu transgender juga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, yaitu keharusan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Meskipun sesungguhnya seorang transgender mempunyai alat kelamin laki-laki, akan tetapi ia bukan merupakan seorang laki-laki yang mempunyai sifat kelakian, melainkan seorang laki-laki yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Dari sisi sejarah kekhilafahan Islam tidak ada satu pun khalifah yang merupakan seorang transgender. Itu karena Islam tidak membolehkan seorang transgender menjadi pemimpin, dan haram hukumnya menyerahkan kepemimpinan kepada seorang transgender.⁶²

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti menganalisis tentang kepemimpinan transgender menurut hak asasi manusia dan *fiqh siyasah* serta menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang kepemimpinan transgender menurut hak asasi manusia dan *fiqh siyasah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut HAM seorang transgender dapat menjadi pemimpin sedangkan dalam *fiqh siyasah* seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Mengenai persamaannya yaitu HAM dan *fiqh siyasah* sama-sama mengakui bahwa jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan, serta perbedaannya menurut HAM seorang transgender dapat menjadi pemimpin sedangkan dalam *fiqh siyasah* tidak boleh.

⁶¹ Resti Hedi Juwanti, *Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2017), h. 90

⁶² *Ibid.* h. 90

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathurrahman dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer Bandung: Mizan, 1993.
- Ali al-salus, *Imamah dan Khifah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang: 2003.
- Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi, Jakarta: Sadra International Institute, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* Jakarta: Liberty, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: CV. Toha Putra, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Farida Elfia, DKK, "Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia". *Diponegoro Law Riview*, Vol. I, No. 4 (18 Agustus 2019).

- Febri Ayu Choiriyah, *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam, Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta*), (Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011.
- Forsyth, Craig J., and Heith Copes. 2014. *Encyclopedia of Social Deviance*. Terjemahan Andi Syaifullah Surabaya: Pustaka, 2005.
- H A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2019.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987.
- J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997.
- Jerry Parker, *Transgender Woman*, Terjemahan Agus Prasetyo Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al- Machreq sarl Publishers, 2000.
- M Dahlan Al-Barry dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2005.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: PT Abadi, 2002.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia, 1983.
- Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.
- Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Mesir: Dâr al-Hadits, tt.
- Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr* Beirut: Dâr al-Kutub, 2000.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, Terjemahan Hawasi dan Musa Kazhim Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nagoshi, Julie L. and Stephanie Brzuzy. "Transgender Theory: Embodying Research and Practice." *Affilia: Journal of Women and Social Work*, Vol. 25, No. 4, 2010.
- Oliven, John F, *Sexual Hygiene and Pathology*, Terjemahan Syaiful Hidayat Bandung: Bulan Bintang, 2005.
- Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, tt.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003
- Richard Eknis, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, Terjemahan Eko Purnomo Surabaya: Pustaka, 2007.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi* Jakarta: Erlangga, 2008.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* Jakarta: Gema Insani, 2003.

Supatmi, Mamik Sri, *Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Permayarakatan Indonesia; Sebuah Inisiatif untuk Reformasi Model Rehabilitasi an Reintegrasi Sosial yang Berpihak pada Perempuan* Depok: Pustaka, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual dan Transgender* Depok: tp, 2013.